

PENGARUH EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL PAJAK TERHADAP TINGKAT OTONOMI FISKAL

Sutoyo

Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta,
Email: ty@wimaya-energy.com
Jalan SWK 104 (Lingkar Utara), Condongcatur, Yogyakarta 55283

Hendi Suryo Praherso

Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta,
Email: hendyfrogmen@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Effectiveness of Revenue, the General Allocation Fund, and Tax Revenue Fund for Fiscal Autonomy Levels (Financial Independence). This research is a study in the district and city in the province of Central Java. The data used in this study is secondary data from reports Actual Revenues and Expenditures Government of Regency / City in the province of Central Java in 2007 until 2009. model analysis used was multiple regression. Research result indicate that simultaneous levels of effectiveness of local revenue, the General Allocation Fund Tax Revenue and significantly positive effect of the level of fiscal autonomy (independence of Finance). Partial variable General Allocation Fund is significantly negative effect on Fiscal Autonomy Levels (financial Independence). The effectiveness level of local revenue and tax sharing funds not significantly effect the level of fiscal autonomy (independence of Finance).

Keywords : *Fiscal Autonomy, Effectiveness of revenue.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan ekonomi membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab (Bastian, 2001). Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti

ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*).

Tingkat otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Meskipun dalam pelaksanaannya dana yang digunakan tidak hanya sebatas PAD tetapi juga transfer berupa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Namun ketergantungan terhadap transfer harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan utama yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Perimbangan keuangan antar Pemerintah Daerah dan Pusat yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing.

Darwanto dan Yustikasari (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Thesaurianto (2007) melakukan penelitian mengenai analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah di provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi investasi daerah, maka akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Harahap (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh terhadap Belanja Modal. Wahyuni dan Adi (2009) melakukan penelitian mengenai analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah

dengan sampel penelitian se Jawa-Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH pajak selalu mengalami pertumbuhan positif selama periode pengamatan. Namun demikian, DBH SDA masih mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Oates (1995), Lin dan Liu (2000) menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Dengan demikian bahwa desentralisasi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.

Kebijakan terkait mengenai otonomi daerah tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dan UU No 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang tersirat dalam perundangan tersebut, adalah pencerminan proses demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu penerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan titik berat kepada pemerintah kabupaten/ kota. Untuk menghadapi implementasi undang-undang tersebut, salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah penentuan kekhasan daerah yang merupakan unggulan dengan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal sebagai modal untuk peningkatan kegiatan ekonomi.

Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD yang merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah dan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*) di Indonesia, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari dua (2) jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang berperan sebagai penyeimbang fiskal antara

pusat dan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Pertumbuhan ekonomi domestik Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. Pendapatan daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah angka PDRB per kapita.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana, 2001). Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah dan semakin tinggi PDRB per kapita maka semakin sejahtera penduduk suatu wilayah tersebut. Berikut data pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah tahun 2001 sampai dengan 2009:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2001-2009 (dalam jutaan)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	
			PDRB Per Kapita	Persentase
2001	830,974.16	875,304.12	3,762,298.62	3.59 %
2002	1,242,709.46	717,960.51	3,581,152.36	3.55 %
2003	1,467,004.57	985,407.97	3,998,119.98	4.98 %
2004	1,865,390.53	789,076.69	4,155,759.96	5.13 %
2005	2,490,643.74	807,132.66	4,328,693.93	5.35 %
2006	2,630,621.27	1,185,860.72	4,689,985.08	5.33 %
2007	2,932,795.57	1,419,340.00	4,913,801.20	5.59 %
2008	3,968,843.47	1,504,184.01	5,142,780.73	5.46 %
2009	4,000,735.71	1,691,853.08	5,345,700,00	4.70 %

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama periode 2001-2006 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,65 persen. Selama periode 2007-2009 mengalami penurunan. Tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,138 persen dari tahun sebelumnya dan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Pada periode 2007-2009 terjadi penurunan karena masih terkenanya dampak krisis global pada tahun 2007. Sedangkan Perkembangan PDRB perkapita mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan mengingat PDRB perkapita adalah rata-rata PDRB tiap penduduk. Hal ini berarti kesejahteraan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah semakin meningkat tiap tahunnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1). Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DBHP secara simultan terhadap Tingkat Otonomi Fiskal (2). Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DBHP secara parsial terhadap Tingkat Otonomi Fiskal.

Tingkat Otonomi Fiskal

Menurut Halim (2007), "Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah." Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan

daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Otonomi fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Rasio Otonomi Fiskal (Kemandirian Keuangan) dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002), "Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah".

Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2007) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007), "Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah", dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Menurut Mardiasmo (2002), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah (Bawono, 2008).

Rasio DAU dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening kas Umum Daerah (Harahap, 2009).

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah dan 90% untuk daerah. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16,2% untuk propinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk kabupaten/ kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan.

Dana Bagi Hasil Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah; 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16% untuk propinsi yang bersangkutan; dan 64% untuk kabupaten/ kota yang bersangkutan. Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerimaan Negara dari PPh WPOPND Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%. DBH PPh WPOPND Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 dibagi

dengan rincian sebagai berikut: 8% untuk propinsi yang bersangkutan; dan 12% untuk kabupaten/ kota dalam propinsi yang bersangkutan.

DBH PPh WPOPND Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21 dibagi dengan rincian berikut: 8,4% untuk kabupaten/ kota tempat wajib pajak terdaftar, dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/ kota dalam propinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Rasio DBHP dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Realisasi DBHP}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Anggaran Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/ 2003).

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*.

Anggaran Tradisional

Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *lineitem* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak

ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan.

New Public Management (NPM)

Munculnya era *New Public Management* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (*performance budgeting*), *Zero Based Budgeting* (ZBB), dan *Planning, Programming, and Budgeting System* (PPBS).

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD berdasarkan pada Permendagri 13/ 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu: "pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah."

Hipotesis Penelitian

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Di dalam konteks internasional beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah diantaranya Cheng (1999) Friedman (1978) Hoover & Sheffrin (1992). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus pemerintah daerah di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolumbia, Republik Dominika, Honduras dan Paraguay. Friedman dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa kenaikan pajak akan meningkatkan kenaikan belanja.

H1 : Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Otonomi Fiskal.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Deller et al. (2002) menganalisis hubungan pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan menggunakan data 581 kota dan villages di Wisconsin, Amerika Serikat, menemukan bahwa

untuk setiap dollar kenaikan dalam Pendapatan per kapita, maka pengeluaran total per kapita meningkat sekitar 12 sampai 15 sen. Untuk setiap kenaikan dalam pendapatan bagi hasil per kapita, peningkatan per kapita mencapai 46-55 sen. Selain itu ditemukan juga adanya penurunan dalam pendapatan pajak property per kapita sebesar 32-41 sen sebagai akibat dari setiap kenaikan sebesar 1 dollar dalam pendapatan bagi hasil.

H2: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Otonomi Fiskal.

2. METODE PENELITIAN

Sampel dan Data Penelitian

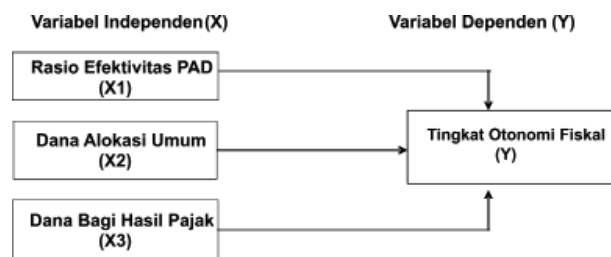
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/ kota yang terdapat di provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sata sekunder yang bersumber dari data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian variabel penelitian diklasifikasikan menjadi variabel dependen (Y) dan Variabel independen (X). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Tingkat Otonomi Fiskal. Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. DAU adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kerangka Pikir dan Model Penelitian



Gambar 1
Kerangka Konseptual

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

- Y = Belanja Daerah
- α = Konstanta
- β = Slope atau Koefisien Regresi
- X_1 = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Dana Alokasi Umum
- X_3 = Dana Bagi Hasil Pajak
- e = error term

3. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dan asumsi klasik, maka data memenuhi unsure-unsur tersebut. Di mana data berdistribusi normal dan terbebas dari persoalan. multikolinearitas, heteroskedastis, autokorelasi, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu analisis regresi dan pengujian goodness of fit.

Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) secara simultan terhadap Tingkat Otonomi Fiskal.

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	86.017	3	28.672	10.223	.000 ^a
Residual	140.231	50	2.805		
Total	226.247	53			

a. Predictors: (Constant), DBHP, PAD, DAU

b. Dependent Variable: TOF

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2012

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas diperoleh p value pada uji F sebesar 0,000 (signifikan), karena nilai P value < 0,05. Dengan demikian variabel independen yaitu Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DBHP secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Otonomi Fiskal (Hipotesis 1 didukung).

Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) secara parsial terhadap Tingkat Otonomi Fiskal.

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	27.463	4.254			6.455	.000
EFEKT. PAD	.015	.014	.122		1.069	.290
DAU	-.280	.053	-.666		-5.249	.000
DBHP	-.115	.167	-.086		-.690	.493

a. Dependent Variable: TOF

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2012

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yang dimasukkan dalam model hanya satu variabel yang signifikan mempengaruhi Tingkat Otonomi Fiskal. Variabel tersebut adalah Dana Alokasi Umum yang menunjukkan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:

$$TOF = 27,463 + 0,015 \text{ EFEKT.PAD} - 0,280 \text{ DAU} - 0,115 \text{ DBHP} + e$$

Hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar -0,280 artinya jika Dana Alokasi Umum berubah satu satuan sedangkan nilai Rasio Efektivitas PAD, Dana Bagi Hasil Pajak konstan maka perubahan nilai Tingkat Otonomi Fiskal sebesar - 0,280.

Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai adjusted R square sebagai berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 ^a	.380	.343	1.67470	2.338

a. Predictors: (Constant), DBHP, PAD, DAU

b. Dependent Variable: TOF

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2012

Pembahasan

Variabel Rasio Efektivitas PAD memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Otonomi Fiskal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,290 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,122 menunjukkan bahwa Efektivitas Pendapatan Asli Daerah hanya berpengaruh 12% terhadap tingkat Otonomi Fiskal di provinsi Jawa Tengah.

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki korelasi negatif signifikan terhadap variabel Tingkat Otonomi Fiskal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar -0,666 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh sebesar 66% terhadap Tingkat Otonomi Fiskal di provinsi Jawa Tengah.

Sejak adanya Otonomi mendorong tiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam kebijakannya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum berperan sebagai pemerata fiskal antar daerah (*fiscal equalization*). Bantuan ini sangat membantu keuangan daerah terutama daerah yang memiliki potensi fiskal yang rendah.

Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah hendaknya mengelola dengan baik dana tersebut untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan utama dari pemberian transfer untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah dapat tercapai.

Variabel Dana Bagi Hasil Pajak memiliki korelasi negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Otonomi Fiskal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,493 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar -0,086 menunjukkan

bahwa Dana Bagi Hasil Pajak hanya berpengaruh 8,6% terhadap Tingkat Otonomi Fiskal.

Hasil pengujian dengan uji koefisiensi determinasi (R^2) diperoleh besarnya nilai adjusted R^2 dalam model regresi sebesar 0,343. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kemampuan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak dalam menjelaskan Tingkat Otonomi Fiskal yang dapat dijelaskan oleh model regresi ini adalah sebesar 34,3%, sedangkan sisanya sebesar 65,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini (di luar model).

Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Otonomi Fiskal. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linear berganda (*ordinary least square*).

Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan bahwa secara simulatan variabel Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Otonomi Fiskal. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikansi 0,000 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Otonomi Fiskal.

Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Otonomi Fiskal, sedangkan variabel Rasio efektivitas PAD dan variabel Dana bagi hasil pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Saran penelitian selanjutnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dan produktivitas daerah perlu membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. Kemudian penggunaan data

yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga dapat mengeneralisasi hasil penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti regulasi pemerintah untuk memperbaiki kondisi iklim makro ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bawono, Bernanda. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat dan Banten), Hasil Penelitian Ull Yogyakarta.
- Cheng, Benjamin S. 1999. Causality between taxes and expenditure: Evidence from Latin American Countries. *Journal of Economics and Finance* 23 (2): 184-192.
- Deller, Steven, Craig Maher, & Victor Lledo. 2002. Wisconsin local government, state shared revenues and the illusive flypaper effect. University of Wisconsin-Madison, *working paper*.
- Darwanto & Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

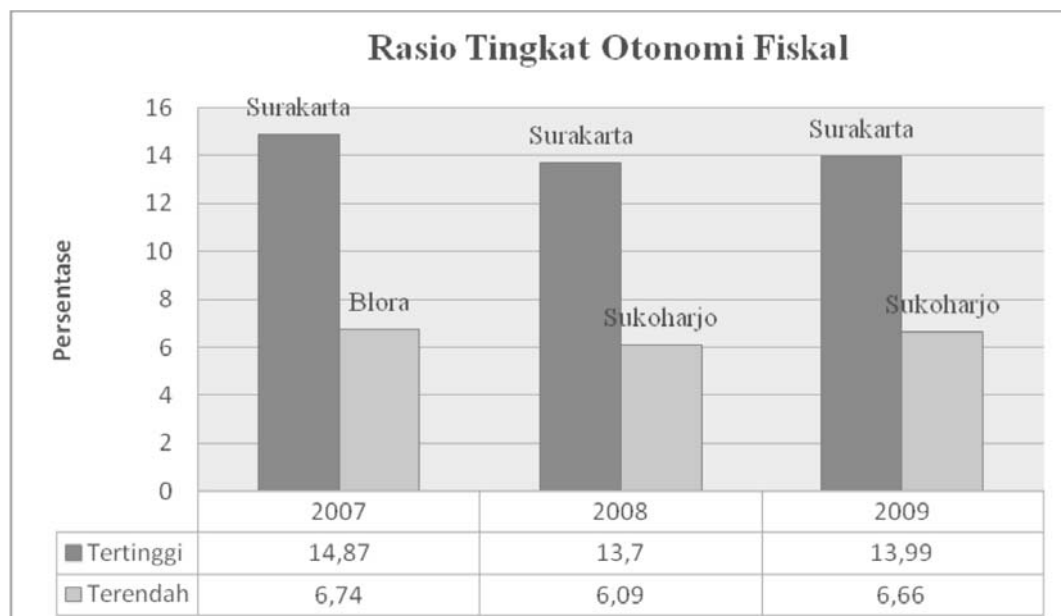
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2003. Abdul, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/ Tahun XIII/25*.
- Harahap, Alfian H. 2009. "Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara". Hasil Penelitian Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi, Medan.
- Hartono, Jogiyanto. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman)*. Edisi Revisi. BPFE-Yogyakarta.
- Hoover, Kevin D. & Steven M. Sheffrin. 1992. Causation, spending, and taxes: Sand in the Sandbox or tax collector for the welfare state? *The American Economics Review* 82 (1): 225-248.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Kuncoro, Haryo. 2007. "Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia", *Symposium Nasional Akuntansi X*. Makassar
- Lin, Justin Yifu & Zhiqiang Liu. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. Economic Development and Cultural Change Chicago. Vol.49. Hal :1-21.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Oates, Wallace E. 1995. *Comment on "Conflict and Dilemmas of Decentralization" by Rudolf Helmas*. The World Bank Research Observer.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiris di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol.8 No.2*.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- _____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Tesis. Universitas Diponegoro Program Pasca Sarjana. Semarang.
- Wahyuni & Adi. 2007. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabpaetrn/ Kota se Jawa-Bali). *The 3rd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Widodo, Pambudi Tri. 2007. Flypapper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Bali (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Bali). Hasil Penelitian UII. Yogyakarta.
- www.djpk.depkeu.go.id. 2012
- www.jatengprov.go.id. 2012

Lampiran

Tabel 4.3
Rasio Tingkat Otonomi Fiskal Tahun 2007-2009
 (dalam persen)

No	Kabupaten dan Kota	Rasio Tingkat Otonomi Fiskal		
		2007	2008	2009
1	Kabupaten Banjarnegara	7.12	6.75	8.22
2	Kabupaten Banyumas	11.09	11.08	11.33
3	Kabupaten Blora	6.74	7.05	6.88
4	Kabupaten Brebes	7.74	7.77	8.30
5	Kabupaten Karanganyar	8.88	8.36	8.69
6	Kabupaten Kebumen	7.21	6.84	7.16
7	Kabupaten Kendal	11.67	9.99	9.72
8	Kabupaten Magelang	9.17	9.68	8.66
9	Kabupaten Pekalongan	7.60	7.45	8.68
10	Kabupaten Pemasang	8.13	8.82	9.87
11	Kabupaten Purbalingga	8.11	9.33	11.33
12	Kabupaten Purworejo	7.54	7.21	8.09
13	Kabupaten Rembang	8.28	8.83	9.35
14	Kabupaten Sukoharjo	6.90	6.09	6.66
15	Kabupaten Tegal	8.91	7.38	8.19
16	Kota Pekalongan	7.78	7.76	8.09
17	Kota Salatiga	11.96	11.56	13.87
18	Kota Surakarta	14.87	13.70	13.99

Sumber: Data yang diolah Peneliti, 2012



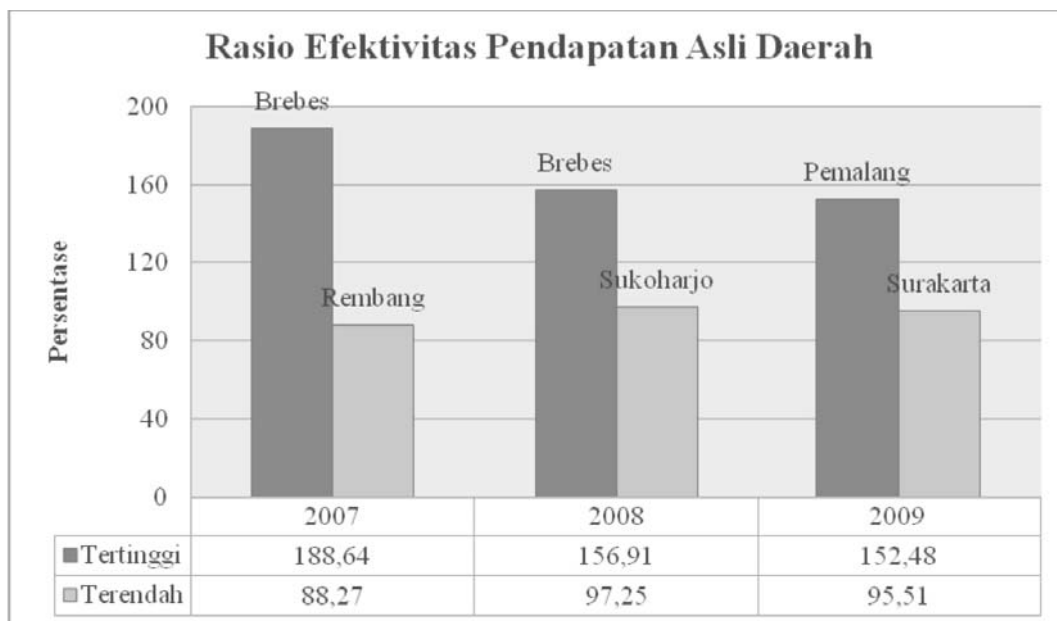
Grafik 4.1

Perkembangan Rasio Tingkat Otonomi Fiskal
 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah periode 2007-2009.

Tabel 4.4
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2007-2009
(dalam persen)

No	Kabupaten dan Kota	Rasio Efektivitas PAD		
		2007	2008	2009
1	Kabupaten Banjarnegara	122.87	111.18	122.25
2	Kabupaten Banyumas	115.70	120.58	118.84
3	Kabupaten Blora	141.19	110.63	99.39
4	Kabupaten Brebes	188.64	156.91	123.34
5	Kabupaten Karanganyar	116.85	118.89	104.61
6	Kabupaten Kebumen	106.91	108.64	103.08
7	Kabupaten Kendal	144.62	122.67	122.63
8	Kabupaten Magelang	116.04	113.93	108.67
9	Kabupaten Pekalongan	114.07	117.87	121.47
10	Kabupaten Pemasang	123.95	126.93	152.48
11	Kabupaten Purbalingga	120.46	113.47	120.78
12	Kabupaten Purworejo	120.89	129.26	128.08
13	Kabupaten Rembang	82.77	108.04	100.23
14	Kabupaten Sukoharjo	113.09	97.25	108.22
15	Kabupaten Tegal	109.10	112.61	105.09
16	Kota Pekalongan	134.13	138.33	143.00
17	Kota Salatiga	118.96	131.62	133.50
18	Kota Surakarta	103.57	108.30	95.51

Sumber: *Data yang diolah Peneliti, 2012*

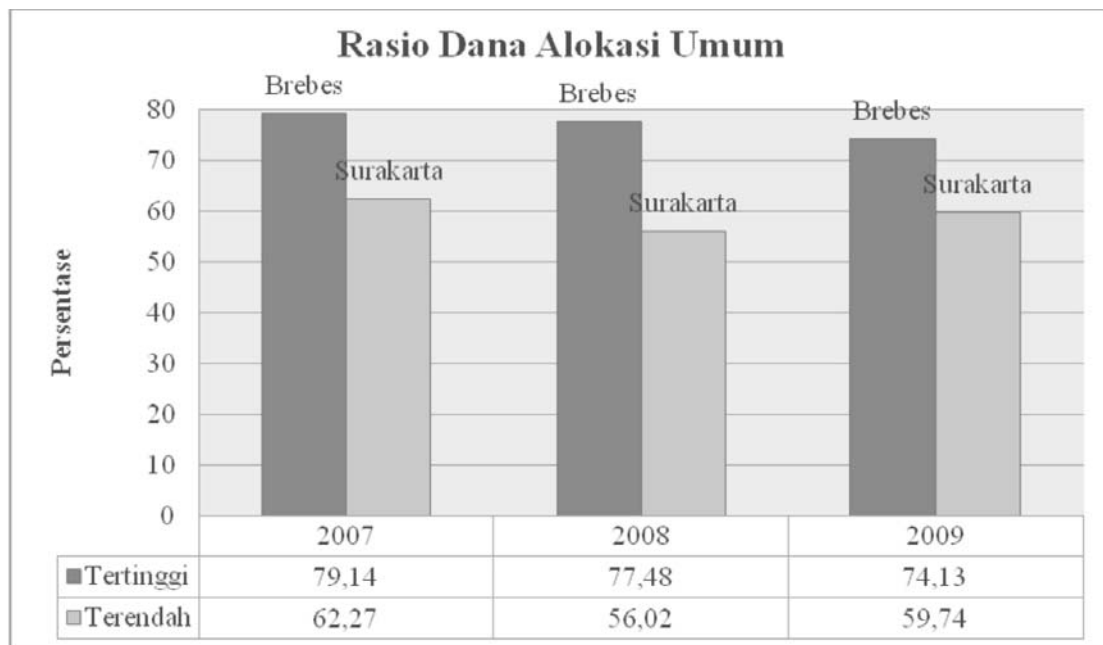


Grafik 4.2
Perkembangan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah periode 2007-2009.

Tabel 4.5
Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2007-2009
 (dalam persen)

No	Kabupaten dan Kota	Rasio Dana Alokasi Umum		
		2007	2008	2009
1	Kabupaten Banjarnegara	71.84	70.92	68.46
2	Kabupaten Banyumas	75.24	72.47	69.10
3	Kabupaten Blora	69.54	67.20	67.47
4	Kabupaten Brebes	79.14	77.48	74.13
5	Kabupaten Karanganyar	71.60	65.62	67.20
6	Kabupaten Kebumen	77.80	71.96	72.55
7	Kabupaten Kendal	69.90	68.42	64.87
8	Kabupaten Magelang	71.76	70.09	68.31
9	Kabupaten Pekalongan	73.83	69.13	70.54
10	Kabupaten Pemasang	77.29	76.34	73.51
11	Kabupaten Purbalingga	75.13	67.04	62.96
12	Kabupaten Purworejo	73.73	72.71	70.09
13	Kabupaten Rembang	70.92	68.78	66.96
14	Kabupaten Sukoharjo	74.85	72.55	71.62
15	Kabupaten Tegal	77.44	75.41	72.60
16	Kota Pekalongan	71.25	68.11	66.65
17	Kota Salatiga	70.24	57.68	63.08
18	Kota Surakarta	62.27	56.02	59.74

Sumber: Data yang diolah Peneliti, 2012

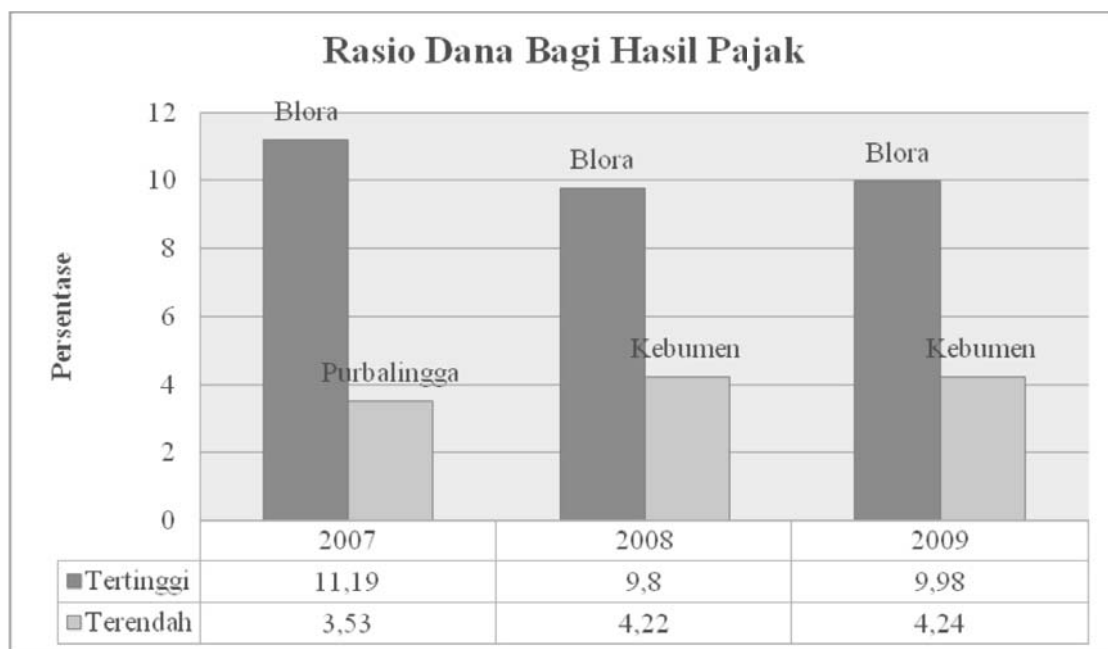


Grafik 4.3
 Perkembangan Rasio Dana Alokasi Umum Kabupaten/ Kota
 di Jawa Tengah periode 2007-2009.

Tabel 4.6
Rasio Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP)
Tahun 2007-2009
(dalam persen)

No	Kabupaten dan Kota	Rasio Dana Bagi Hasil Pajak		
		2007	2008	2009
1	Kabupaten Banjarnegara	5.69	5.74	5.25
2	Kabupaten Banyumas	5.78	5.94	6.12
3	Kabupaten Blora	11.19	9.80	9.98
4	Kabupaten Brebes	5.65	5.33	5.21
5	Kabupaten Karanganyar	5.29	4.76	5.37
6	Kabupaten Kebumen	3.89	4.22	4.24
7	Kabupaten Kendal	4.87	4.64	6.71
8	Kabupaten Magelang	4.74	5.02	5.15
9	Kabupaten Pekalongan	4.98	5.72	4.64
10	Kabupaten Pemalang	5.49	5.55	4.92
11	Kabupaten Purbalingga	3.53	5.26	4.73
12	Kabupaten Purworejo	4.57	4.87	4.67
13	Kabupaten Rembang	6.38	6.02	5.95
14	Kabupaten Sukoharjo	5.14	5.56	5.85
15	Kabupaten Tegal	5.12	4.87	4.75
16	Kota Pekalongan	6.45	6.52	6.90
17	Kota Salatiga	5.86	4.87	6.50
18	Kota Surakarta	8.32	8.00	9.66

Sumber: *Data yang diolah Peneliti, 2012*



Grafik 4.4
Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota
di Jawa Tengah periode 2007-2009.